

BAB III

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

STUDI KASUS DESA GRINTING

Bab ini akan dibahas mengenai temuan-temuan dan data hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Temuan-temuan masalah di lapangan diuraikan dan dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Desa Grinting, dan salah satu warga Desa Grinting sebagai mantan gelandangan dan pengemis di Jakarta. Selain wawancara, penelitian ini juga disertakan beberapa data pendukung yang dapat dijadikan bukti tambahan dalam penelitian ini. Analisis dan uraian data penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kaitannya dengan masalah stigma gelandangan dan pengemis yang disematkan pada Desa Grinting, dimana stigma tersebut sudah menjadi momok dalam skala nasional.

3.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khususnya Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes, seperti kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, memiliki berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi

tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Brebes berakar dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PMKS di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 sebanyak 261.208 jiwa dan yang tertangani sebanyak 143.899 jiwa (55,09%). Kemudian pada tahun 2015 jumlah PMKS menurun menjadi 118.407 jiwa. Mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dan yang mendapatkan penanganan sebanyak 99.544 jiwa (84,07%).¹ Meskipun demikian masih banyak aspek atau indikator PMKS yang juga harus diselesaikan oleh Pemerintah setempat.

Permasalahan kesejahteraan sosial tidak dapat diberantas 100%, Salah satunya adalah permasalahan Gelandangan dan Pengemis. pada tahun 2016, jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Brebes sebanyak 227 jiwa. Dibandingkan dengan data tahun 2012 yakni berjumlah 511 jiwa.² Hal tersebut perlu diapresiasi sebagai keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini Kabupaten Brebes sesuai *SOP* Dinas Sosial kaitannya dengan permasalahan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar ada 2 (dua) aspek penanganan, yaitu penanganan bersifat mendasar dan penanganan yang bersifat dangkal. Penanganan bersifat mendasar merupakan penanganan yang dilakukan secara total, terpadu dan menyeluruh menghilangkan akar penyebab dan gejala geandangan dan pengemis. Penanganan tersebut berupa pengadaan sarana dan prasarana yang

¹ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Tahun 201. Hal. 52.

² RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022. Hal. 64.

diperlukan gelandangan dan pengemis, seperti penguatan posisi administratif kependudukan, penguatan mental dan spiritual, dan lain sebagainya.

Kemudian penanganan yang bersifat dangkal adalah penanganan yang bersifat reaktif dan tidak ditujukan untuk jangka panjang/berkesinambungan. Penanganan ini hanya bertujuan mengurangi penderitaan sesaat. Misalnya bantuan sosial, pengobatan gratis, pemberian sembako, dan lain sebagainya.

Bentuk Penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Operasi Penertiban Sosial.
2. Gerakan Penanggulangan Penyakit Sosial.
3. Bimbingan dan Latihan Kemandirian Tuna Sosial.
4. Pemberdayaan PMKS Tuna Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama
5. Pemantauan Lokasi Rawan Tuna Sosial.

3.2. Sejarah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Desa Grinting

Apabila mendengar istilah penghasil gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berasal dari Kabupaten Brebes, maka orang segera tertuju pada salah satu desa yang berada di Kecamatan Bulakamba, yakni Desa Grinting. Stigma tersebut sudah dikenal dalam skala nasional. Informasi tersebut banyak ditemukan dalam pemberitaan media masa elektronik maupun media *online*.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhartono, SH selaku Kepala Desa Grinting mengenai sejarah awal mula Desa Grinting mendapat stigma “Kampung Pengemis”, beliau mengatakan bahwa:

“memang tahun 80-an yang lalu ini Desa Grinting pernah dicap demikian, karena berhubungan dengan tragedi yang kejadian musibah di Karawang yang kebetulan warga kami yang bekerja di rantau di Jakarta itu kecelakaan, sehingga saat itu meninggal ada 8 orang, itulah terekspos bahwa itu dari Desa grinting yang bekerja di Jakarta. Disana kebetulan kenapa mereka itu adalah pulang bersama pakai truk. Ya banyak meninggal itu, karena memang saat itu kejadian dengan disamping mereka membawa rombongan orang juga membawa rombongan material bangunan, sehingga dari kejadian tabrakan itu material bangunan tersebut menimpa orang-orang itu. Memang betul ada sebagian orang Grinting yang merantau itu meminta-minta tapi juga ada beberapa orang disana sebagai pemborong rumah yang usang lalu dijual lagi. Namun pintarnya media masa disitu mengekspos bahwa itu adalah orang pengemis semua, sehingga terkenal dengan itu. Namun hampir tiap tahun media memberitakan seperti itu.”³

Awal mula Desa Grinting mendapat julukan atau stigma sebagai “*kampung pengemis*” yang sekaligus menggelandang di Kota Jakarta adalah sebagian penduduk Desa Grinting pada waktu itu merantau ke Jakarta dengan berbagai macam profesi. Namun Kepala Desa Grinting yakni Bapak Suhartono tidak menyangkal bahwasanya ada sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pengemis di Kota Jakarta. Stigma tersebut semakin menguat karena adanya pemberitaan media masa baik elektronik maupun online.

Kemudian menurut Kompas TV dalam Program Aiman yang meliput mengenai pengemis di Ibukota. Berita tersebut bertajuk “*Rumah Mewah Milik Gelandangan*”, berkesempatan mewawancarai Kepala Desa Grinting, bahwasanya menurut keterangan Bapak Suhartono selaku Kepala Desa Grinting, yang

³ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono selaku Kepala Desa Grinting. Pada tanggal 14 Juni 2019. Jam 08.00 WIB di Desa Grinting.

melatarbelakangi warga Desa Grinting menjadi pengemis di ibukota adalah faktor tingkat ekonomi keluarga yang rendah.⁴

3.3. Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Stigma Desa Grinting Sebagai “Kampung Pengemis”

Selanjutnya untuk permasalahan Desa Grinting mengenai stigma “*kampung pengemis*” yang menggelandang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pihak pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan Pemerintah Desa Grinting yang bertanggungjawab dalam permasalahan ini. Karena sebagian penduduk warga Desa Grinting yang merantau sebagian besar ke Jakarta lalu sebagian bekerja sebagai pengemis. Menurut Bapak Arif, SSt, selaku Kepala Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas, mengatakan bahwa:

*“Banyak laporan dari warga Desa Grinting yang saudaranya tertangkap Satpol PP di Jakarta. Mereka datang kemari (Dinas Sosial) meminta bantuan supaya saudaranya atau keluarganya untuk segera dipulangkan. Ini terjadi biasanya pada saat musim bulan ramadhan dan menjelang lebaran.”*⁵

“Kalau kita bicara PMKS, ya, kita sebagai bidang yang menangani rehabsos khususnya PGOT, penanganan PMKS di tingkat Kabupaten Brebes dari 297 desa, intinya menurut saya seperti ada stigma di desa grinting waktu tahun 2015, ini masih rumor ya, rumor itu kan ada segi positif atau negatif, seharusnya orang kan melihatnya dan berwawasan secara objektif, kita lihat objektifnya. Saya tahu grinting ini sebenarnya mereka berbagai macam usaha di sana (Kota Jakarta) itu sebenarnya banyak, tidak hanya mengemis saja. Pas kebetulan mungkin ketika mau lebaran kepergok orang Grinting padahal yang lainnya banyak gitu loh. Saya yakin. Pemerintah Kota Jakarta sering menghubungi saya kaitannya dengan penjarangan

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=2ek_ad255BU . Kompas TV. Program Aiman. *Rumah Mewah Milik Gelandangan*. Diakses pada tanggal 20 April 2019. Pukul 20.37 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Syaefudin, SSt. Selaku Kepala Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas. 29 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di kantor Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

PGOT, ini Brebes ada berapa desa yang tertangkap itu tidak hanya Grinting saja, dari Tegal ada, Slawi juga ada. setiap mau lebaran saya sering dihubungi dari Panti Ngudi Rahayu yang menangani PGOT di Jakarta yang punya Gubernur itu loh, kita dikontak yasudah ada berapa orang Brebes yang tertangkap, saya siap membuat surat rekomendasi, makanya permasalahan PGOT tidak hanya pengemis saja artinya luas. ini kan penanganannya PGOT, itu penanganan waktu tahun 2015, memang saya akui.”⁶

Keterangan diatas menunjukkan bahwa praktek yang demikian masih ada pada warga Desa Grinting yang dilakukan sejak tahun 80-an. Sudah barang tentu hal ini menjadi stigma dan melekat kuat karena terlalu sudah terlalu lama praktek tersebut dijalani oleh sebagian warga Desa Grinting. Meskipun ada sebagian warga Desa Grinting yang merantau ke Jakarta tidak untuk menggelandang dan mengemis. Kemudian peran Pemerintah disini yang bertanggung jawab terhadap domisili asal warga yang terjaring untuk membantu mutasi rehabilitasi dari Kota Jakarta ke Kabupaten Brebes.

Oleh sebab itu, dalam penanganan masalah PMKS, kaitannya dengan gelandangan dan pengemis, peneliti menggali informasi tentang Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus kepada Dinas Sosial, Bapak Arif, SSt. menjelaskan bahwa:

“Kalau Perbup, belum ada. Tapi hanya MOU pemutusan mata rantai, yakni ketika orang gelandangan dari Brebes menggelandang ke Kuningan, bagaimana MoU Pemerintah Kuningan mengembalikan warga Brebes ke asalnya. Mou itu dihadiri antar kepala daerah yang bersangkutan untuk menandatangani MoU, Sekda juga hadir. Dalam rangka pengentasan PGOT di tetangga wilayah, seperti Kuningan, Cirebon, Majalengka, Brebes,

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Syaefudin, SSt. Selaku Kepala Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas. 29 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di kantor Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Tegal, daerah berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu diselenggarakan pada tahun 2015”.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Brebes menanggulangi masalah sosial dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan wilayah sekitar Brebes dalam bentuk MoU, kaitannya dengan menanggulangi permasalahan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) antar wilayah perbatasan wilayah setempat.

Bapak Arif Syaefudin, SSt. selaku Kepala Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Brebes menambahkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Brebes menambahkan bahwa banyak bantuan yang sudah diberikan bagi warga Desa Grinting kaitannya penanggulangan stigma gelandangan dan pengemis yaitu sebagai berikut:

“Tahun 2013 saya diangkat menjadi Kepala Seksi, sekarang 2019. Saya 6 tahun sudah menjadi Kepala Seksi, waktu itu tahun 2013 saya mendapat kucuran dana dari provinsi, provinsi memberikan dana penanganan PGOT banyak, saya arahkan, jangan sampai warga-warga yang kiranya untuk Brebes yang ada stigma kaya gini saya tutup, untuk saya kasih program. Guna memutus mata rantai stigma tersebut jangan sampai merantau kesana.”⁷

Meskipun bantuan telah banyak diberikan namun dalam proses monitoring dan evaluasi dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak pembinaan yang diberikan bantuan. Berikut penjelasan Beliau:

“Secara umpan balik ,jujur, saya kembalikan ke pembinaan desa masing-masing”⁸

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Disisi lain, Dinas Sosial mempunyai kekurangan mengenai tindak lanjut secara berkelanjutan terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Adapun bantuan dalam bentuk program guna mengentaskan warga Desa Grinting yang merantau di Jakarta dari jerat kemiskinan maupun mental gelandangan dan pengemis sebagai mata pencaharian. Bantuan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial menurut Beliau adalah sebagai berikut:

“Jadi saya katakan pada mereka untuk mengupayakan uang ini walaupun kecil dapat dimanfaatkan, enatah itu berbagai program ya, seperti program lansia, program UEP saya kasihkan kepada mereka bahkan untuk anak nakal (anak terlantar) saya sempatkan disini. Saya upayakan untuk dapat memutus mata rantai dan stigma tersebut.”⁹

Lalu Beliau menambahkan bahwasanya bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Grinting. Berikut penjasaln beliau:

“Saya mensosialisasikan bantuan kepada mereka sekaligus memberikan UEP kepada mereka. Walaupun jumlahnya kecil loh ya. Ya satu orang 2 (dua) juta rupiah ya lumayan lah ya. Terus bentuk barang, Anda (penerima bantuan) minta apa, kambing, saya kasih kambing. Pak saya minta alat ini pak, lalu saya kasih sudah. Yang penting aku ga mau tahu, yang penting njenengan (penerima bantuan) pintarnya apa untuk kemandirian njenengan (penerima bantuan), biar tidak merantau. Memutuskan mata rantai stigma kampung pengemis.”¹⁰

Penyelesain masalah kemiskinan yang menjadi penyebab warga menggelandang dan mengemis di kota-kota besar tidak luput dari *turun tangan*

⁹ ibid

¹⁰ ibid

Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Namun sifat dari bantuan tersebut termasuk dalam bantuan dangkal yang sifatnya hanya stimulan.

Kemudian menurut pengakuan beliau selaku wakil dari Dinas Sosial yang menangani tuna sosial dan disabilitas, menganggap bahwa program dan bantuan yang diberikan masuk dalam kategori keberhasilan pemerintah, berikut penjelasan beliau:

“Estimasi saya 90%, mata rantai terputus. Mata rantai dalam arti keturunan-keturunan mereka itu ga mau lagi berangkat ke kota dan mengemis. Merubah mindset, jujur aja orang sini banyak yang berhasil di jakarta. terus banyak juga yang kerja di perhotelan. Jadi, jujur regenerasi sekarang sudah tidak berpikir seperti dulu. Njenengan (peneliti) bisa lihat ketika Njenengan (penulis) masuk Desa Grinting dengan desa lain, disini persaingannya ketat. Luar biasa. Dan orang sini orangnya agresif, mengikuti kreasi dan inovasi yang ada di era sekarang. Banyak yang pendidikannya tinggi. Jujur jadi atau tidak jadi yang penting sekolah tinggi dulu, yang penting perkara kuliah selesai. Minimal harus tingkat D3 untuk orang sini.”¹¹

Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diharapkan, meskipun tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Menurut penuturan Bapak Arif, kaitannya dengan faktor pendukung dan penghambat, berikut penjelasan beliau:

“Kalau bicara menghambat, saya lihat mereka justru menyambut baik program dari saya. Lalu saya katakan kepada mereka, bahwasanya ada bantuan untuk PGOT dan mereka antusias menerima bantuan itu. Jadi saya kira untuk hambatan tidak ada. Kalau untuk faktor pendukung, pemerintah khususnya dari aparat desa itu mendukung. Bahwa pemerintah itu hadir dan masyarakat juga tahu. Karena ada berita itu (stigma kampung pengemis), pemerintah itu turun menangani masalah tersebut”¹²

¹¹ ibid

¹² ibid

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hampir tidak ada kendala dari penanggulangan PMKS kaitannya stigma gelandangan dan pengemis Desa Grinting. Disebabkan adanya keterbukaan masyarakat akan bantuan dan antusias dalam menghapuskan stigma Kampung Pengemis di Desa Grinting. Hambatan terjadi pada saat Dinas Sosial Kabupaten Brebes melakukan sosialisasi pembinaan pada pelaku gelandangan dan pengemis, dikarenakan masalah komunikasi dan pemahaman antara peserta sosialisasi dan narasumber kaitannya dengan materi yang disampaikan

3.4. Upaya Pemerintah Desa Grinting terhadap Stigma Desa Grinting Sebagai “Kampung Pengemis”

Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba ,Kabupaten Brebes sangat terkenal di media masa elektronik, cetak, maupun online. Desa tersebut terkenal bukan karena potensinya namun terkenal sebagai *Desa Penghasil Pengemis* atau *Kampung Pengemis*. Sesuai dengan pemberitaan online bahwasanya dikarenakan sebagian besar warganya banyak melakukan urbanisasi demi merubah nasib kehidupan di kampung, namun dengan bekerja menggelandang dan mengemis.

Hal tersebut tentu saja sangat memprihatinkan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hartono selaku Kepala Desa Grinting ,berikut penjelasan beliau:

“Orang Grinting itu unik usahanya. Saya tidak munafik bahwa ada yang meminta-minta, tapi perlu juga kami sampaikan di sana (perantauan) ada yang benar-benar bawa modal, contoh: menampung kerompongan (barang bekas) di lapak, kemudian di sana pedagang nasi atau warung-warung. Dan yang paling menarik disini orang-orang di sana menampung

kerompongan (barang bekas), di situ juga menyediakan bedeng-bedeng (lapak) untuk menampung orang-orang mereka kerja. Dan biasanya yang suami kerja mengumpulkan barang bekas, ya, kemudian yang istrinya mungkin ada yang seperti itu (mengemis). Tapi perlu diketahui dalam bedeng-bedeng tersebut tidak hanya orang Brebes, tapi ada orang Pekalongan, Pemalang, Indarmayu, Sukabumi ada di situ. Tapi karena sudah dicap bahwa Grinting desa pengemis, setiap ada trantib ada operasi orang-orang seperti itu (gelandangan dan pengemis) pikirnya dia orang mana, oh orang Brebes, Brebesnya mana? Grinting. Tapi kalau dicek KTP-nya bukan.”¹³

Oleh karena itu Bapak Hartono selaku Kepala Desa mengupayakan penanggulangan bagi warganya yang berprofesi menggelandang dan mengemis di kota-kota besar seperti Kota Jakarta, berikut pemaparan beliau:

“Upaya kami adalah memberdayakan. Kami punya cita-cita bahwa yang dulu Grinting pernah menjadi Pengemis bagaimana Grinting menjadi Pengemas. Artinya Pengemas disini, kebetulan Grinting ini adalah sumber daya dari alam yang ada, terutama adalah ikan bandeng, dan sumber lainnya ada, artinya kami bertekad dengan ibu-ibu PKK dan UKM. Lalu munculah UKM olahan bandeng. Bahkan setiap event-event kabupaten dimunculkan.”¹⁴

Upaya Pemerintah Desa Grinting mensosialisasikan warganya bahwa potensi desa dapat dijadikan prioritas nilai ekonomi. Melalui pemanfaatan hasil dari tambak ikan bandeng yang dapat diolah dalam bentuk lain. Selanjutnya potensi yang dimiliki Desa Grinting dimanfaatkan oleh Ibu Kepala Desa istri Bapak Hartono sekaligus selaku Ketua PKK Desa Grinting bersama anggota PKK yang lain. Berikut pemaparan beliau mengenai pengolahan potensi Desa Grinting yaitu sebagai berikut:

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Hartono selaku Kepala Desa Grinting. Di Balai Desa Grinting. 13 Juni. Pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Ibid.

“Dengan munculnya slogan pengemis jadi pengemas. Artinya yang belum tertata, misal tadi bandeng yang masih bahan mentah ternyata dikemas menjadi olahan lain, ternyata dapat bermanfaat. Jadi bandeng yang biasa kita jual namun belum diolah laku Rp 20.000/kg tapi setelah dikemas seperti ini mempunyai nilai jual Rp 90.000.”¹⁵

Pemanfaatan potensi desa tersebut melalui anggota PKK Desa Grinting bertujuan mengupayakan kesejahteraan warga Desa Grinting melalui potensi yang tidak disadari sebelumnya. Bahwasanya potensi tersebut ketika diolah ternyata memiliki nilai jual ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan ekonomi warga Desa Grinting.

Tidak hanya potensi desa dari sumberdaya alam, juga adanya penggalakan ekonomi kreatif yaitu kerajinan tangan dari pemuda Desa Grinting, berikut penjelasan Bapak Hartono selaku Kepala Desa Grinting, yakni sebagai berikut:

“Dinamika pemuda Grinting dengan dibandingkan desa lain sekitar Grinting paling unggul, dengan kreasi dan inovasinya. Banyak kerajinan tangan yang dihasilkan dari pemuda Grinting, berupa tas daur ulang dari plastik, ukiran asbak patung.”¹⁶

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama antara warga Desa Grinting dan Pemerintah setempat untuk mengupayakan terhapusnya stigma Desa Grinting Sebagai “kampung pengemis” yang menggelandang di kota-kota besar.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Kepala Desa Grinting pada 12 Juni 2019, pukul 10.00 WIB

¹⁶ ibid